

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara merupakan hal yang harus menjadi prioritas suatu negara, dalam rangka untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Begitu juga negara Indonesia, yang menjadi negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, pembangunan ekonomi menjadi prioritas, untuk mencapai kesejahteraan sekaligus untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia, masih terdapat banyak masalah ekonomi, salah satu masalah ekonomi yang sampai sekarang ada, dan merupakan masalah yang serius adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, melainkan masalah sosial ekonomi yang bersifat jangka panjang, sekaligus fenomena yang terjadi di banyak negara berkembang, yang sulit diatasi. Ristika, Primandhana, dan Wahed dalam jurnalnya, masalah kemiskinan muncul karena sebagian orang yang masih belum mampu mengatur kehidupannya hingga taraf yang manusiawi, yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia, sehingga terjadi penurunan produktivitas dan pendapatan.¹

Prasetyoningrum dan Sukmawati dalam jurnalnya, dalam perspektif Islam, kemiskinan merupakan masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang

¹ E.D. Ristika, W.P.Primandhana, & M. Wahed, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12, No. 2, 2021, hal. 129.

tidak bisa melaksanakan kewajiban agama dengan maksimal, tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik, serta mendapat akses kesehatan yang layak.²

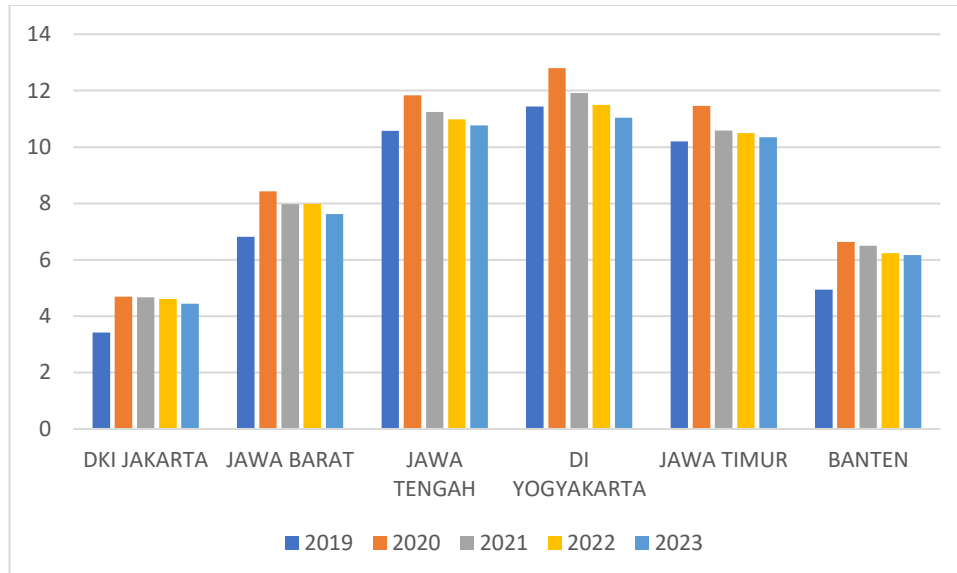
Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang berskala global, dihadapi setiap bangsa. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan yang pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial.³

Masalah kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang rumit. Pemerintahan Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi problem ini. Dalam sepuluh tahun terakhir tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung fluktuatif, namun trennya cenderung menurun. Masalah kemiskinan menjadi perhatian serius di tingkat provinsi, terkhusus di Provinsi Jawa Tengah. Dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki presentase penduduk miskin terbesar. Berikut ini presentase penduduk miskin enam provinsi di Pulau Jawa.

² A.K. Prasetyoningrum & U.S. Sukmawati, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 219.

³ Saharuddin Didu & Ferri Fauzi, *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak*, Jurnal Ekonomi-Qu Vol. 6, No. 1, 2016 hal. 103.

Gambar 1.1
Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa.⁴



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Presentase penduduk miskin di enam provinsi Di Pulau Jawa mengalami naik turun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2019 merupakan presentase penduduk miskin paling rendah di enam provinsi di Pulau Jawa, dan pada tahun 2020 presentase peningkatan miskin peningkatan yang drastis. Hal ini disebabkan oleh fenomena wabah COVID-19 yang melanda. Besaran presentase penduduk miskin mengalami penurunan secara perlahan pada tahun 2021-2022. Namun penurunan presentase penduduk miskin pada tahun-tahun pasca wabah COVID-19, masih terbilang tinggi, dan belum bisa menyamai besaran presentase penduduk miskin pada tahun 2019. Dalam periode tahun 2019-2023, Provinsi Jawa Tengah memiliki besaran presentase penduduk miskin terbanyak kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan besaran 10.77% pada tahun 2023.

⁴ Badan Pusat Statistik , *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah*, 2024.

Besaran angka dan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah tidak lepas dari beberapa faktor, mulai dari banyaknya jumlah pengangguran dalam suatu wilayah. Pengangguran dapat disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang ada setiap tahunnya, sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu fenomena atau masalah yang terjadi secara global seperti krisis pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2022, juga berdampak pada turunnya pendapatan industri, yang berefek pada meningkatnya tingkat pengangguran. Pengangguran bertambah menjadi lebih serius disebabkan oleh perkembangan penduduk yang bertambah cepat. Azis, Yulmardi, dan Nurhayani dalam jurnalnya, pengangguran akan berefek pada menurunnya pendapatan masyarakat, dan hal itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh masyarakat.⁵ Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang sering ditemui di beberapa negara, khususnya di negara berkembang. Damayanti dan Fisabilillah dalam jurnalnya dijelaskan bahwa, pengangguran dideskripsikan sebagai sekelompok individu yang memasuki usia 15 tahun atau lebih serta tergabung pada angkatan kerja, yang sedang mencari kerja dan belum memperoleh pekerjaan.⁶ Tingkat pengangguran terbuka adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut adalah data tingkat pengangguran terbuka, Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2023.

⁵ M. Azis, Yulmardi, & Nurhayani, *Analisis Pengaruh Inflasi, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi*, e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 10. No. 2, 2021, hal. 76.

⁶ A. Damayanti & L.W.P. Fisabilillah, *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Malang*, INDEPENDENT : Journal Of Economics Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 4.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2023.⁷

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2014	5,68
2015	4,99
2016	4,63
2017	4,57
2018	4,47
2019	4,44
2020	6,48
2021	5,95
2022	5,57
2023	5,13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Dari tabel 1.2, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama periode cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 5,68%. Namun angka tersebut cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2019, sebesar 4,44%. Namun tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 dengan 6,48 %, yang menjadi angka tingkat pengangguran terbuka terbesar dalam 10 tahun terakhir. Fenomena krisis wabah COVID-19 menjadi faktor yang paling

⁷ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023*.
<https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt..html> (Diakses pada 31 Juli 2024)

berpengaruh dalam meningkatnya angka tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun setelahnya hingga tahun 2023 angka tersebut cenderung menurun, namun besaran angkanya cenderung lebih besar dari angka tingkat pengangguran terbuka sebelum wabah COVID-19.

Selain pengangguran, faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan, dan masih memiliki kaitan dengan pengangguran adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin berdampak pada banyaknya jumlah angkatan kerja, yang kemudian memperbesar kemungkinan meningkatnya tingkat kemiskinan.⁸ Jumlah penduduk yang meningkat tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya unsur-unsur pertumbuhan ekonomi lainnya dapat menyebabkan pendapatan yang tidak meningkat dan juga permintaan yang tidak meningkat.⁹ Berikut adalah data jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2023.

Tabel 1.2

⁸ R.K. Damanik & S.A. Sidauruk, *Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Darma Agung Vol. 28, No. 3, 2020, Hal. 360.

⁹ Debi Anggraini, Muchtolifah, & Sishadiyati, *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan*, Jambura Economic Education Journal Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 88.

**Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Periode Tahun 2014-2023 ¹⁰**

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)
2014	33,522
2015	33,774
2016	34,019
2017	34,257
2018	34,490
2019	34,718
2020	36,516
2021	36,742
2022	37,032
2023	37,540

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Dari tabel 1.3, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dalam 10 tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan Pembangunan ekonomi, sebagaimana penjelasan dari Reza, Ria Kurnia, dan Desmawan, dalam penelitiannya, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan tidak terkontrol, menyebabkan tujuan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai serta kesejahteraan masyarakat menurun.¹¹

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Jumlah Penduduk (Jiwa)*.
<https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html> <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html> (Diakses pada 31 Juli 2024)

¹¹ R.N. Fauzi, R.K. Febriani, & D. Desmawan, *Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, Ebismen: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, Vol. 1, No.1, tahun 2022, hlm. 119

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah kualitas hidup manusia, atau yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator, yaitu umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.¹² IPM menjadi parameter pembangunan, sebagaimana penjelasan dari Ristika, Primandhana, dan Wahed, yaitu¹³ IPM merupakan salah satu parameter pembangunan di suatu daerah yang berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Semakin tinggi angka IPM menandakan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik. Berikut adalah data indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014-2023.

Tabel 1.3

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah

¹² Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2019, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).

¹³ E.D. Ristika, W.P.Primandhana, & M. Wahed, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12, No. 2, 2021, hal. 130

Periode Tahun 2014-2023¹⁴

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)
2014	68,78
2015	69,49
2016	69,98
2017	70,52
2018	71,12
2019	71,73
2020	71,87
2021	72,16
2022	72,79
2023	73,39

Selain dari dua faktor tersebut, indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah, pada periode tersebut terus mengalami kenaikan. Hal tersebut menggambarkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya selaras dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Hal yang mendorong peneliti untuk memilih lokasi di Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak kedua setelah Jawa Timur, dengan

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Indeks Pembangunan Manusia*.
<https://semarangkab.bps.go.id/indicator/26/84/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-di-provinsi-jawa-tengah.html> (Diakses pada 31 Juli 2024)

29 Kabupaten dan 6 Kota. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Tabel 1.4

Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak

Provinsi	Jumlah Penduduk tahun 2023 (Ribuan Jiwa)
Jawa Barat	49,860
Jawa Timur	41,416
Jawa Tengah	37,540
Sumatra Utara	15,386
Banten	12,307

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan tabel 1.5, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 berjumlah 37,5 juta jiwa, hanya kalah dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Banyaknya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sangat berefek pada masalah sosial dan kependudukan, dan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, dan kemiskinan.

Berdasarkan uraian dan data mengenai kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023?
4. Apakah tingkat pengangguran, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh signifikan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan jumlah penduduk terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh secara simultan tingkat pengangguran, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis sebagai sumber informasi tambahan dan membantu perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang studi kajian ilmu ekonomi mengenai pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi akademis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa kajian ilmu kepastakaan dan refrensi keilmuan ekonomi syariah.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya guna menambahkan pengetahuan khususnya bagi pihak yang tertarik dengan masalah yang sama.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Jawa Tengah, pada periode tahun 2019-2023. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari empat variabel yaitu

a. Variabel bebas (X) meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (X1),

Jumlah Penduduk (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3).

b. Variabel terikat, (Y) adalah Kemiskinan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya suatu batasan masalah untuk menghindari salah penafsiran. Objek akan dianalisa dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian, terdapat kajian definisi agar mempermudah penelitian antara lain:

1. Definisi Konseptual

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.¹⁵ Pengangguran atau tuna karya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-

¹⁵Lisa Marini & Novi Tri Putri, *Peluang Terjadinya Pengangguran di Provinsi Bengkulu : Seberapa Besar?, Convergence : The Journal Of Economic Development. Vol. 1(1) : 70-83, Hal. 73.*

proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.¹⁶ Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.¹⁷

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia.¹⁸

d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹⁹

2. Definisi Operasional

Pengaruh penduduk yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu, dan indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan dan mutu manusia, terhadap kondisi ketidakmampuan

¹⁶ Hilmi, M.N.H.D. Marumu, Ramlawati, C.D. Peuru, *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli*, *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol 1, No 1, 2022, Hal. 21.*

¹⁷ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Kependudukan*

<https://jatim.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#:~:text=Penduduk%20adalah%20semua%20orang%20yang,responden%20menurut%20sistem%20kalender%20Masehi>. (Diakses pada 14 Mei 2024)

¹⁸ P.U. Faratihika, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*, *Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 4, No. 2 September 2020, Hal.103*

¹⁹ A. Budiarto, *Analisis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020*. [https://pusaka.magelangkab.go.id/blog/detail/26#:~:text=BAPPENAS%20\(2004\)%20mendefinisikan%20kemiskinan%20sebagai,dan%20mengembangkan%20kehidupan%20yang%20bermartabat](https://pusaka.magelangkab.go.id/blog/detail/26#:~:text=BAPPENAS%20(2004)%20mendefinisikan%20kemiskinan%20sebagai,dan%20mengembangkan%20kehidupan%20yang%20bermartabat). (Diakses pada 14 Mei 2024)

manusia dalam memenuhi kebutuhannya di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam sub bab. Sistematika skripsi bertujuan untuk memperjelas pembahasan dan analisis data. Maka dari itu sistematika skripsi adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian. Selain latar belakang masalah, juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan pembatasan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi teori tentang kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia, dan apa saja yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi. Pada Bab ini terdapat konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini membahas tentang mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian yang terdiri terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini membahas hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN. Bab ini merupakan pembahasan dan penelaahan lebih dalam terkait hasil penelitian

BAB VI PENUTUP. Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban atas permasalahan pada bagian diatas yang berisi kesimpulan dan saran.